

PENGARUH PUNGUAN POMPARAN RAJA NAIAMBATON (PARNA) PADA PEMILUKADA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016

Bryan Anderson¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email:bryanderson77@yahoo.com¹,andreasnoak@fisip.unud.ac.id²,aliazhar23mr@yahoo.co.id³

ABSTRACT

Kinship system is referred to as Batak Association, such as Punguan Pomparan Raja Naiambaton (PARNA) that located in District of Simalungun. The purpose of this study to determine and describe the influence factors of Parna Association in the election District of Simalungun 2016. The theory used is theory of identity politics with primordial approach. This research method is descriptive qualitative. Research data collection techniques by observation, interview and documents. The results of this study found that Parna Association legitimacy as a majority is dominating community in District of Simalungun at the election by supporting one candidate regent that have relation. People in District of Simalungun still give prioritize aboriginal to become a leader in the region that can be seen from the way determining the choice of candidates still based on several factors: blood ties, races, religions, and regions.

Keywords: Parna Association, Election, Political Identity

PENDAHULUAN

Berdasarkan dari garis keturunannya, masyarakat Batak memiliki sebuah kesamaan yaitu adanya marga. Dalam sejarah budaya Batak, garis keturunan akan diwarisi oleh seorang anak laki-laki sehingga sistem kekerabatan masyarakat Batak disebut *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan marga dan kelompok-kelompok suku, lalu kemudian saling dihubungkan menurut garis laki-laki (Vergouwen, 1986:1). Sistem kekerabatan masyarakat Batak dikenal sebagai kumpulan suatu kelompok yang terbentuk karena terdapatnya kesamaan marga dalam garis keturunan seorang raja. Salah satu Punguan Batak yaitu Punguan Pomparan Raja Naiambaton (PARNA) yang berada di Kabupaten Simalungun.

Pada tahun 2010 Punguan Parna ikut terlibat dalam pemilukada di Kabupaten Simalungun dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati JR Saragih-Hj Nuriati Damanik, yang sekaligus menjadi pemenang pada saat itu. Pada pemilukada selanjutnya, yang dilaksanakan tahun 2016, kehadiran

fenomena etnis pada pemilukada di Kabupaten Simalungun membuat Punguan Parna ikut terlibat langsung dalam mengkonstruksikan harapan dan keinginannya untuk merebut kekuasaan politik.

KAJIAN PUSTAKA

Punguan Parna

Di dalam hubungan relasi sosial orang Batak, kehadiran marga merupakan dasar untuk menentukan *partuturan* (keturunan), hubungan persaudaraan, baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang yang memiliki marga lain. Punguan Batak terbentuk karena adanya kesamaan marga, asal-usul keturunan Raja atau juga didasari oleh ikatan emosional sesama Orang Batak sebagai masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi menurut Abdillah (2002:18), yaitu orang atau kelompok yang mengklaim diri sebagai penduduk asli suatu daerah dan wilayah tertentu.

Perkembangan sosial budaya yang terus bergerak cepat di Indonesia menimbulkan kembalinya muncul fenomena etnis di tingkat

lokal. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya fenomena identitas dalam masyarakat Batak yang biasa disebut Punguan Batak, salah satunya yaitu Punguan Parna. Punguan Parna yang menjadi sistem kekerabatan orang Batak dikenal sebagai wadah untuk berkumpulnya masyarakat Batak dalam garis keturunan Raja Naiambaton. Punguan Parna merupakan Punguan Batak terbesar yang terdiri dari 48 marga.

Pemilukada

Perjalanan demokrasi tingkat lokal selalu mengalami perubahan yang cukup signifikan baik itu dari segi hukum, mekanisme ataupun lainnya. Sejarah mencatat penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal pernah bersifat sentralistis pada proses pemilihan kepala daerah, dimana pilihan ditentukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam tahapan ini rakyat masih belum berdaulat atas konstelasi demokrasi di tingkat lokal untuk memilih kepala daerahnya sebab sistem yang berjalan masih bersifat oligarki.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem ini telah menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah menuju ke arah yang lebih demokratis dimana rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya. Sejarah mencatat pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Dalam prosesnya pilkada kemudian dimasukkan ke dalam rezim pemilu, hal ini dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada DKI Jakarta 2007 menjadi pemilihan kepala daerah pertama kali yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi

Undang-Undang digunakan sebagai aturan yang berlaku pada pemilukada di Indonesia saat ini.

Demokrasi

Pada era demokrasi, persamaan dan kesederajatan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu dan kelompok dalam mengekspresikan identitas serta aspirasinya. Hal inilah yang melandasi dasar pemikiran politik identitas dalam penelitian ini.

Dalam pandangan Dahl (1985:25), negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakannya MDP (*modern, dynamic, pluralist*). Dia mengatakan bahwa tujuan utama negara demokrasi yang maju ialah memusatkan perhatian dalam mencari cara-cara untuk dapat mengurangi sumber ketidaksamaan dalam masyarakat itu sendiri daripada melaksanakan persamaan melalui sumber daya ekonomi, posisi dan suatu kesempatan.

Demokrasi memiliki keterkaitan dengan kebebasan setiap individu sehingga secara keseluruhan toleransi antara eksistensi demokrasi dan kebebasan individu sangat tinggi. Arus gelombang demokrasi menandai adanya reformasi di segala bidang sehingga menjadi pemantik utama bagi kelahiran kembali suatu identitas budaya dalam eksistensi gerak dinamika budaya lokal. Dialog internal dan interaksi sosial membangun sebuah ikatan antarindividu di dalam masyarakat berdasarkan budaya dan psikologis seseorang dalam suatu komunitas sosial budaya untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang diperjuangkannya.

POLITIK IDENTITAS

Politik identitas Punguan Parna bermula dari proses pembentukan pembangunan identitas masyarakat Batak. Hubungan politik dan kekuasaan dari identitas dalam politik identitas, dikonstruksikan pada pembentukan pembangunan identitas oleh seseorang atau sekelompok orang. Konstruksi sosial dari identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan.

Castells (2010:8) menyebutkan tiga bentuk pembangunan identitas, yaitu:

- a. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan

- melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial.
- b. Identitas resisten (*resistance identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok dan golongannya.
 - c. Identitas proyek yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru pada masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan.

Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, mengemukakan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh setiap pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi "orang asli" yang menghendaki kekuasaan dan mereka untuk setiap "orang pendatang" harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas hanya digunakan sebagai alat memanipulasi demi untuk menggalang politik agar memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya".

Clifford Geertz (1992) mengatakan kemerdekaan yang baru dialami oleh negara-negara berkembang sering dihadapkan pada sentimen-sentimen primordial. Primordial juga sering digunakan sebagai politik identitas etnis, dimana identitas etnis tetap dipertahankan karena dianggap bermanfaat sebagai basis massa suatu kelompok yang dapat digerakkan.

Pendekatan primordialisme ini berfungsi untuk menjelaskan pengaruh ikatan primordial dalam Punguan Parna terhadap pemilukada Kabupaten Simalungun tahun 2016. Ikatan primordial mengacu pada beberapa sebab yang biasanya muncul bersama dan berlawanan tujuan secara deskriptif meliputi masalah-masalah yang timbul dalam beberapa hal, yaitu: hubungan darah, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami secara menyeluruh tentang pengaruh

Punguan Parna pada pemilukada Kabupaten Simalungun tahun 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2014 berjumlah 844.033 jiwa yang terdiri dari 420.591 laki-laki dan 423.442 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,33 jiwa, tersebar di 31 kecamatan. Berdasarkan data kependudukan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Simalungun menganut agama Islam yaitu berjumlah 468.328 jiwa diikuti oleh agama Kristen Protestan sejumlah 302.302 jiwa dan agama Katholik 42.132 jiwa, sedangkan untuk penganut agama lainnya berjumlah 4.958 jiwa.

Kabupaten Simalungun didominasi oleh Etnis Batak Simalungun, salah satunya adalah Punguan Parna. Punguan Parna menjadi salah satu punguan terbesar yaitu terdiri dari 48 marga. Marga yang terdapat pada Punguan Parna yaitu Simbolon, Tinambunan, Tumanggor, Turuten, Maharaja, Pinayungan, Nahampun, Tamba (Sitonggor), Siallagan, Turnip, Tamba (Lumban Tonga-tonga), Sidabutar, Sijabat, Siadari, Sidabalok, Tamba, Siambaton, Munte, Tamba, Rumahorbo, Napitu, Sitio, Sidauruk, Simalango, Saing, Simarmata, Nadeak, Saragi, Sumbayak, Sitanggung, Sigalingging, Manihuruk, Garingging, Tendang, Banurea, Manik Kecupak/ Mengidar, Gajah, Bringin, Brasa, Boang Manalu, Bancin, Saraan, Kombih, Berampu, Munthe, Damunthe, Dalimunthe, dan Ginting.

Terbentuknya Punguan Parna diawali dengan pertemuan-pertemuan kecil yang menghimpun Punguan Parna dari *nagori* (desa) ke kecamatan lalu ke tingkat kabupaten. Selanjutnya perumusan Punguan Parna dilakukan pada tanggal 14 Desember 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan ikrar yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2015.

Pemilukada di Kabupaten Simalungun mengalami penundaan dikarenakan terjadi pencoretan pasangan calon bupati nomor

urut 4 oleh KPU Kabupaten Simalungun. Setelah melalui beberapa mekanisme yang ada, akhirnya pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Simalungun dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016. Terdapat lima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos untuk mengikuti pemilukada di Kabupaten Simalungun yaitu pasangan nomor urut 1 Tumpak Siregar - Irwansyah Damanik diusung partai PDIP, Hanura, dan PKB. Nomor urut 2 Evra Sasky Damanik – Sugito maju melalui jalur perseorangan, nomor urut 3 Hj Nuriati Damanik - Posman Simarmata diusung partai Golkar, Nasdem dan Gerindra. Nomor urut 4 JR Saragih - Amran Sinaga diusung partai Demokrat dengan dukungan 11 kursi DPRD dan nomor urut 5 Lindung Gurning - Soleh Saragih maju melalui jalur perseorangan.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Simalungun, total jumlah pemilih di Kabupaten Simalungun adalah 662.421 jiwa dengan rincian sebagai berikut: daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 654.697 jiwa, DPT tambahan 2.558 jiwa, daftar pemilih pindahan (DPP) 300 jiwa, serta pengguna KTP 4.866 jiwa. Namun jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya 53,38% dari total jumlah pemilih yaitu 353.660 jiwa. Hasil dari pemilukada Kabupaten Simalungun, pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga menang dengan perolehan jumlah suara total 120.860 suara, diikuti oleh pasangan Tumpak Siregar - Irwansyah Damanik 92.454 suara, pasangan Evra Sasky Damanik – Sugito 67.470 suara, pasangan Hj Nuriati Damanik - Posman Simarmata 59.940 suara, dan pasangan Lindung Gurning - Soleh Saragih 7.204 suara.

Dampak politik dari legitimasi terhadap dominasi Punguan Parna di Kabupaten Simalungun salah satunya terlihat pada pemilukada dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati yang merupakan *dongan tubu* (saudara semarga). Dampak tersebut menjadikan Punguan Parna sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu politik identitas. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini adalah pendekatan primordial meliputi hubungan darah, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

Punguan Parna mendukung pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun sebagai informan, yaitu:

1. Ikatan identitas antara pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga dengan Punguan Parna.
2. Hubungan darah berdasarkan keturunan si Raja Naiambaton.
3. JR Saragih sebagai *incumbent* dalam pemilukada di Kabupaten Simalungun.
4. Ketertarikan terhadap anak parna yang mencalonkan diri sebagai bupati daripada wakil bupati.
5. JR Saragih sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Kabupaten Simalungun.

Hasil temuan penelitian, identitas Punguan Parna sampai saat ini masih terjaga dan terpelihara dikarenakan terdapat adat istiadat yang tetap dipertahankan. Punguan Parna memiliki simbol *sisada anak sisada boru*, simbol ini merupakan warisan petuah yang berasal dari Raja Naiambaton. Simbol *sisada anak sisada boru* itu adalah semua marga parna itu harus memiliki rasa kekerabatan yang tinggi, karena mereka semua termasuk satu keluarga garis keturunan. Di sisi lain, sesama marga parna tidak boleh saling menikahi, hal ini dipegang teguh oleh semua orang yang ber-marga parna dan seseorang juga tidak berani untuk melanggarnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, legitimasi Punguan Parna sebagai mayoritas mendominasi masyarakat di Kabupaten Simalungun. Dampak politik dari legitimasi tersebut terhadap dominasi Punguan Parna di Kabupaten Simalungun salah satunya terlihat pada pemilukada dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati yang merupakan *dongan tubu* (saudara semarga). Dampak tersebut menjadikan Punguan Parna sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu politik identitas. Menurut Manuel Castells, pembangunan identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial.

Kemunculan politik identitas dalam hal ini dikuatkan dengan konsep politik identitas Kemala Chandakirana (1989) yang mengemukakan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi "orang asli" yang menghendaki kekuasaan dan mereka untuk "orang pendatang" harus melepaskan kekuasaan. Konsep identitas dari Kemala diinterpretasikan oleh penulis bahwa "orang asli" lebih diutamakan untuk memimpin daerah asalnya dibandingkan

dengan “orang pendatang”, dimana “orang asli” yang dimaksud adalah putra daerah sedangkan “orang pendatang” merupakan orang yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hasil temuan penulis ditemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Simalungun masih mengutamakan anak daerah untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan yang masih terjaga dengan baik, salah satunya yaitu Punguan Parna. Dalam hal ini Punguan Parna juga digunakan sebagai alat politik dalam mendukung salah satu calon bupati di Kabupaten Simalungun yaitu pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga.

Berdasarkan analisis dari penulis, dalam menentukan pilihan terhadap calon bupati, masyarakat Kabupaten Simalungun masih didasari oleh beberapa faktor yaitu hubungan darah, ras, agama, dan daerah. Dilihat dari keempat faktor tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa hubungan darah masih menjadi hal yang diutamakan ketika masyarakat menentukan pilihan pasangan calon bupati. Faktor ras yang sama memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk kemudian direalisasikan sesuai dengan harapan. Faktor agama juga masih menjadi salah satu faktor yang menonjol dimana sebagian masyarakat akan memilih pasangan calon bupati yang menganut agama yang sama. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simalungun menganut agama Islam yaitu sekitar 57,3%. Hal ini yang menyebabkan setiap pasangan calon baik itu calon bupati maupun wakil bupati salah satunya beragama Islam. Faktor daerah menjadi pertimbangan bagi pemilih dikarenakan anak daerah dari Kabupaten Simalungun lebih diprioritaskan sebab masyarakat ingin dipimpin oleh putra daerahnya.

Analisis tersebut dikuatkan melalui konsep pendekatan primordial dari Clifford Geertz yang mengatakan bahwa primordial juga sering digunakan sebagai politik identitas etnis, dimana identitas etnis tetap dipertahankan karena dianggap bermanfaat sebagai basis massa suatu kelompok yang dapat digerakkan. Identitas etnis terafiliasi oleh berbagai unsur-unsur perekat atau pengikat kekeluargaan, seperti: unsur ras, kepercayaan atau agama, budaya dan warisan-warisan para leluhurnya. Konsep primordial ini relevan untuk digunakan Punguan Parna sebagai tali pengikat

masyarakat melalui hubungan darah, ras, agama, dan daerah Kabupaten Simalungun.

Selain pengaruh dari Punguan Parna, terdapat mesin partai politik yang bergerak dalam pemenangan JR Saragih-Amran Sinaga. Partai politik yang mengusung JR Saragih-Amran Sinaga yaitu partai Demokrat yang memiliki 11 kursi pada lembaga DPRD Kabupaten Simalungun. Hal ini menunjukkan bahwa partai Demokrat memberikan kontribusi dalam kemenangan JR Saragih-Amran Sinaga.

Berdasarkan keseluruhan analisis penelitian mengenai pengaruh Punguan Parna pada pemilukada 2016 di Kabupaten Simalungun, Punguan Parna memberikan dukungannya terhadap JR Saragih-Amran Sinaga dikarenakan adanya ikatan marga. Kemudian Punguan Parna mempengaruhi masyarakat melalui pendekatan primordial untuk mendukung JR Saragih-Amran Sinaga. Punguan Parna pada akhirnya menjadi alat politik bagi JR Saragih-Amran Sinaga yang akhirnya memenangkan pemilukada 2016 Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN

Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun memunculkan kembali fenomena identitas lokal. Identitas Punguan Parna di Kabupaten Simalungun memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Salah satunya terlihat dari ketelibatan Punguan Parna pada pemilukada Kabupaten Simalungun tahun 2016. Legitimasi Punguan Parna sebagai mayoritas mendominasi masyarakat di Kabupaten Simalungun untuk mencapai tujuan politik tertentu, sekaligus memberikan pengaruh pada pelaksanaan pemilukada.

Pengaruh Punguan Parna pada pemilukada di Kabupaten Simalungun tahun 2016 diantaranya. *Pertama*, Punguan Parna memberikan dukungan terhadap pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga didasari oleh ikatan marga selain itu masyarakat di Kabupaten Simalungun hingga saat ini masih mengutamakan anak daerah untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan yang masih terjaga dengan baik, salah satunya yaitu identitas Punguan Parna.

Kedua, Punguan Parna mempengaruhi masyarakat melalui pendekatan primordial untuk mendukung JR Saragih-Amran Sinaga. Nilai-nilai identitas dan sistem kekerabatan dengan konsep pendekatan primordial digunakan oleh Punguan Parna untuk

menarik simpati masyarakat agar memilih pasangan calon bupati JR Saragih-Amran Sinaga melalui semangat kesamaan hubungan darah, ras, agama, dan daerah. Hal itu dibuktikan dari hubungan darah yang masih menjadi hal penting ketika masyarakat menentukan pilihan pasangan calon bupati di Kabupaten Simalungun. Di sisi lain, faktor ras yang sama diharapkan lebih mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Faktor agama bagi masyarakat memiliki pertimbangan yang besar sebab masyarakat akan memilih pasangan calon bupati yang menganut agama yang sama dikarenakan 57,3% masyarakat di Kabupaten Simalungun menganut agama Islam. Maka dari itu seluruh pasangan calon baik itu calon bupati maupun wakil bupati pada pemilukada tahun 2016 salah satunya dipastikan menganut agama Islam. Faktor daerah juga ikut menjadi pertimbangan bagi pemilih dikarenakan anak daerah dari Kabupaten Simalungun lebih diprioritaskan sebab masyarakat ingin dipimpin oleh putra daerahnya. Selain pengaruh dari Punguan Parna, terdapat mesin partai politik yang bergerak dalam kemenangan JR Saragih-Amran Sinaga. Partai politik yang mengusung JR Saragih-Amran Sinaga yaitu partai Demokrat dimana partai Demokrat juga memberikan kontribusi dalam kemenangan JR Saragih-Amran Sinaga.

Pengaruh Punguan Parna pada pemilukada Kabupaten Simalungun, akhirnya memenangkan pasangan calon JR Saragih-Amran Sinaga. Hal ini menunjukkan politik identitas Punguan Parna memiliki kekuatan yang besar sebagai alat politik dalam mencapai tujuan tertentu di Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdilah, S. Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Antonius, Bungaran. (2015). *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik (Terjemahan Tim Kunci Cultural Studies Center)*. Yogyakarta: Bentang.
- Berger, Asa Arthur. (2005). *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Buchari, Sri Astuti. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Budiardjo, Miriam. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Edisi Revisi Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dahl, Robert A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol (Terjemahan Sahat Simamora)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Davidson, Jamie S dkk. (2016). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Clifford. (1963). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States*. New York: Free Press.
- Husain, Usman dan Purnomo. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hutagalung, WM. (1991). *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangsa Batak*. Tulus Jaya.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Arif. (2000). *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Poesponegoro, Marwati dkk. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA..

Susanto, Budi. (2003). *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Disertasi, Jurnal, Tesis

Indriani, Farida. (2016). *“Perjuangan Identitas Orang Kajang di Bulu Kumba Sulawesi Selatan”*. (Disertasi) Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.

Haboddin, Muhtar. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. 2012. Diakses dari http://jsp.umy.ac.id/phocadownload/Vol3_No1_2012/6-muhtar.pdf. 29 November 2015, pukul. 21.19 Wib.

Sihombing. (2008). *“Punguan Parna: Organisasi Perantau Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Semarang-Jawa Tengah”*. (Tesis) Program Pascasarjana UGM.

Web

Daniel Taruli Asi Harahap. (2008). Manfaat Punguan Batak. Diakses dari <http://rumametmet.com/2008/06/15/manfaat-punguan-batak/>, 16 November 2015, pukul. 10.00 Wib.

Irma Safni. (2014)“Politik dan Kebudayaan”.Diakses dari <http://www.kompasiana.com/www.irmasafni.com/politikdankebudayaan54f6a670a33311f1558b457>,18 November 2015 pukul. 19.15 Wib.

Yusuf Efendi. (2016) Marga:Keluarga dan Kekerabatan dalam Pengetahuan orang Batak Toba, Sumatera Utara. Diakses dari <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2598/marga-keluarga-dankekerabatan-dalam-pengetahuan-orang-batak-toba-sumatera-utara>,25November 2015, pukul 22.05 Wib.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia 25 Nov 2015, pukul 22.47 Wib.